

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan dunia yang semakin maju, maka semakin bervariasi juga isu-isu yang dihadapi (Jeanice & Kim, 2023). Isu keberlanjutan semakin menjadi perhatian utama di dunia bisnis seiring dengan meningkatnya tuntutan transparansi dari para pemangku kepentingan (Farrel & Dewi, 2025). Hal ini dikarenakan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya pada era modern ini, perusahaan tidak selalu hanya memprioritaskan keuangan saja tetapi juga harus memperhitungkan dampak yang timbul dari kegiatan operasionalnya (Nugroho & Hersugondo, 2022).

Kesadaran akan pentingnya isu keberlanjutan di Indonesia semakin meningkat dan menjadi fokus utama pemerintah dalam mendukung pencapaian *Sustainability Development Goals* (SDG's), serta memperkuat kebijakan praktik bisnis berkelanjutan, khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Pristi & Bandiyono, 2024). BUMN memegang posisi strategis dalam perekonomian nasional karena BUMN tidak hanya berfungsi sebagai perusahaan yang mencari laba, namun juga sebagai agen pembangunan yang harus menjalankan misi sosial dan pelayanan publik (Republik Indonesia, 2003) (Aritonang, 2025). Maka dari itu, pemerintah melalui Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong BUMN agar mengadopsi prinsip-prinsip keberlanjutan dan melaksanakan pelaporan keberlanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan

transparansi, akuntabilitas kepada publik, serta memperkuat tata kelola perusahaan yang berorientasi pada keberlanjutan (Safitri & Arizah, 2025). Namun, dalam praktiknya, BUMN menghadapi berbagai tantangan keberlanjutan pada tiga aspek utama, yaitu aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek tata kelola.

Tantangan keberlanjutan pada aspek lingkungan yang dihadapi BUMN adalah perusahaan dituntut untuk melakukan transisi menuju energi terbarukan, di mana proses transisi ini membutuhkan investasi yang lebih besar dan restrukturisasi model bisnis, sementara operasional berbasis fosil masih mendominasi bauran energi nasional (Ilham & Hasanah, 2023). Selain itu, perusahaan juga menghadapi tekanan untuk mengurangi dampak negatif operasionalnya terhadap lingkungan, seperti emisi karbon, limbah industri, dan konsumsi energi yang berlebihan (Houqe et al., 2022). Misalnya PT PLN (Persero) masih bergantung pada pembangkit listrik tenaga batu bara yang menyumbang emisi karbon signifikan, sementara PT Pertamina (Persero) menghadapi tuntutan untuk mengurangi emisi dari aktivitas eksplorasi dan distribusi energi (Setiawan, 2025) (CNN Indonesia, 2025). Kondisi ini menunjukkan dilema antara tuntutan keberlanjutan dan kebutuhan jangka panjang.

Tantangan keberlanjutan pada aspek sosial yang dihadapi BUMN adalah perusahaan masih menghadapi isu sosial seperti konflik lahan dengan masyarakat lokal akibat dari pembangunan proyek infrastruktur maupun eksploitasi sumber daya alam (Fahmi & Musyarri, 2020). Dalam kasus tertentu, masyarakat merasa kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan atau mendapatkan kompensasi yang tidak memadai, sehingga mengakibatkan terjadinya konflik sosial

dan penurunan citra perusahaan (Alauddin et al., 2024). Misalnya, konflik lahan yang terjadi antara PT Pertamina (Persero) dengan warga di Perumahan Darmo Hill Surabaya, di mana warga sekitar mengeluhkan tidak adanya pemberitahuan ataupun proses rundingan terkait klaim lahan oleh perusahaan sehingga hal ini menimbulkan ketegangan sosial yang berpotensi menghambat kelancaran pembangunan (Devi, 2025). Selain itu, proyek kilang minyak PT Pertamina (Persero) di beberapa daerah juga sempat menimbulkan sengketa dengan masyarakat terkait ganti rugi lahan (Kompasiana, 2025). Kasus ini berhubungan langsung dengan Hak Asasi Manusia (HAM) terutama hak atas tanah dan tempat tinggal, serta hubungan masyarakat (*community relations*) dan kesejahteraan sosial (*social welfare*).

Tantangan keberlanjutan pada aspek tata kelola yang dihadapi BUMN adalah dilema antara tuntutan untuk meraih profitabilitas dan kewajiban pelayanan publik, yang di mana BUMN harus mampu menyeimbangkan mandat sosial sekaligus menjaga efisiensi komersial secara bersamaan, yang menyebabkan perlunya penggunaan dua set metrik tata kelola yang berbeda yaitu untuk Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum) (Qurratulaini et al., 2023). Selain itu, revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang memberikan keleluasaan lebih pada struktur kelembagaan, tetapi juga berpotensi mengurangi transparansi dan akuntabilitas sehingga meningkatkan risiko korupsi dan penyalahgunaan wewenang (Rasji et al., 2024). Misalnya, kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada tahun 2019-2020 mengungkapkan adanya praktik investasi berisiko tinggi, manipulasi laporan keuangan, serta indikasi tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp 16,81 triliun

(Kompasiana, 2024) (BPK RI, 2020). Selain itu, kasus korupsi pesawat di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan dugaan *mark-up*, manipulasi data, serta penyalahgunaan wewenang dalam proses pengadaan pesawat jenis *ATR 72-600* dan *Bombadier*, yang menyebabkan kerugian besar (CNN Indonesia, 2022). Sementara itu, kasus dugaan korupsi PT Pertamina (Persero) pada periode 2018-2023 yang melibatkan pejabat subholding dan kontraktor kerja sama (KKKS) dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 193,7 triliun (Kompas, 2025). Dari kasus-kasus inilah menunjukkan bahwa penerapan prinsip GCG, transparansi, serta pengawasan internal yang masih sangat lemah.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan dan berbagai tantangan nyata yang masih dihadapi oleh BUMN dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Situasi ini dapat memberikan implikasi terhadap reputasi perusahaan dan kepercayaan investor. Maka dari itu, laporan keberlanjutan menjadi instrumen penting bagi BUMN untuk mengungkapkan kinerja pada aspek *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dengan transparan sehingga berpotensi memulihkan kepercayaan publik dan memperkuat persepsi investor terhadap kredibilitas perusahaan (Safitri & Arizah, 2025).

Pengungkapan ESG berperan sebagai media utama bagi perusahaan untuk menyampaikan komitmennya terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Pengungkapan ESG merupakan proses pelaporan dan penyampaian informasi oleh perusahaan mengenai kinerja dan praktiknya dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Melalui laporan keberlanjutan ini perusahaan dapat memberikan

informasi non-keuangan yang mencerminkan tingkat perhatian terhadap praktik bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Pengungkapan ESG yang baik mencerminkan komitmen perusahaan dalam mengelola risiko non-keuangan, meningkatkan kinerja operasional, dan menghasilkan nilai tambah bagi seluruh *stakeholder* (Febriantoko et al., 2025). Pengungkapan ESG yang transparan dan konsisten dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik serta dipersepsikan sebagai sinyal positif oleh investor perihal konsistensi perusahaan dalam menerapkan prinsip keberlanjutan (Chuzairi & Sutopo, 2024; Li et al., 2018).

Selain faktor keberlanjutan, kinerja keuangan juga merupakan indikator utama dalam menilai kapabilitas perusahaan dalam mengalokasikan dan mengendalikan sumber daya secara efisien untuk mencapai sasaran ekonominya. Kinerja keuangan merupakan ukuran kemampuan dan prestasi perusahaan dalam mengoptimalkan alokasi sumber daya keuangan guna merealisasikan sasaran strategis perusahaan, yang berfokus pada pencapaian laba serta pemeliharaan kinerja keuangan yang stabil agar perusahaan dapat bertahan dan berkembang secara berlanjut. Kinerja keuangan yang baik menjadi indikator keberhasilan perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya secara efisien untuk menciptakan laba serta mempertahankan stabilitas finansial. Rasio keuangan, termasuk *Return on Assets (ROA)* kerap dimanfaatkan guna mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan aktiva yang dimilikinya (Lisnawati & Koswara, 2024). Dalam BUMN, pencapaian kinerja keuangan yang baik menjadi sangat penting karena berhubungan langsung dengan kontribusi perusahaan terhadap perekonomian negara sekaligus menjadi indikator keberhasilan dalam pengelolaan dana publik.

Nilai perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor keuangan saja, tetapi juga oleh faktor non keuangan seperti keberlanjutan dan reputasi perusahaan. Nilai perusahaan mencerminkan persepsi pasar terhadap keberhasilan perusahaan dalam mengoptimalkan aloksi sumber daya serta peluang pertumbuhannya pada periode mendatang. Tingginya nilai perusahaan mengindikasikan adanya persepsi positif dari investor mengenai kemampuan perusahaan untuk menciptakan profit dan mempertahankan keberlanjutan usaha. *Price to Book Value* (PBV) merupakan ukuran yang umum digunakan untuk menilai perusahaan karena menunjukkan sejauh mana pasar memberikan penghargaan terhadap nilai buku yang dimiliki perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, baik pengungkapan ESG ataupun kinerja keuangan menjadi dua aspek penting yang berkontribusi dalam membentuk pandangan investor mengenai nilai perusahaan.

Akan tetapi, peningkatan transparansi melalui laporan ESG dan pencapaian kinerja keuangan yang baik tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan nilai perusahaan (Wu et al., 2022). Hal inilah yang menimbulkan keraguan apakah pengungkapan ESG yang dilakukan perusahaan benar-benar mencerminkan praktik keberlanjutan yang sesungguhnya atau hanya sebatas formalitas pelaporan untuk memenuhi tuntutan regulasi. Walaupun pemerintah telah mendorong penerapan prinsip keberlanjutan melalui kewajiban pelaporan ESG bagi BUMN, berbagai kasus di lapangan yang telah dijabarkan sebelumnya menunjukkan bahwa implementasinya masih menghadapi kendala pada aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan penting apakah pengungkapan ESG dan kinerja keuangan yang dilaporkan perusahaan benar-benar

berpengaruh secara positif terhadap peningkatan nilai perusahaan, mengingat investor dapat menilai bahwa laporan keberlanjutan belum sepenuhnya mencerminkan kinerja dan reputasi yang sebenarnya. Dengan kata lain, masih perlu dibuktikan apakah peningkatan pengungkapan ESG dan kinerja keuangan yang baik sudah cukup untuk berkontribusi pada kenaikan nilai perusahaan, terutama pada BUMN yang masih berupaya memperbaiki tata kelola, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap praktik bisnisnya.

Fenomena menarik yang muncul dari penjelasan kondisi tersebut adalah adanya ketidaksesuaian antara tingginya komitmen pemerintah terhadap penerapan prinsip keberlanjutan dengan realita implementasi ESG pada BUMN yang masih menghadapi berbagai kendala. Walaupun laporan keberlanjutan dan kinerja keuangan menunjukkan peningkatan secara berkelanjutan, nilai perusahaan tidak mengalami kenaikan yang berkelanjutan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa transparansi melalui pengungkapan ESG dan pencapaian kinerja keuangan yang baik belum tentu merefleksikan nilai dan reputasi perusahaan di mata investor, sehingga penting untuk diteliti lebih lanjut bagaimana keterkaitan antara pengungkapan ESG, kinerja keuangan, dan nilai perusahaan pada BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Berbagai studi terdahulu telah menelaah pengaruh pengungkapan ESG dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Namun temuan studi terkait pengaruh pengungkapan ESG dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan masih menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa penelitian yaitu Farrel & Dewi (2025), Vivianita et al. (2023), dan Adhi & Cahyonowati (2023) menunjukkan pengaruh

positif pengungkapan ESG terhadap nilai perusahaan, sementara yang lain Ni'mah & Kusumaningtias (2025) dan Hanifah (2025) menunjukkan tidak berpengaruh signifikan atau pengaruh negatif. Ada juga beberapa penelitian, yaitu Depinatalia & Jibrail (2024), Putri (2025) dan Husna & Kadarningsih (2025) menunjukkan bahwa kinerja keuangan berkontribusi pada nilai perusahaan, sementara yang lain Dendo & Zenabia (2025) dan Syahwallistiana, & Yusuf (2025) menunjukkan pengaruh negatif atau berpengaruh tidak signifikan. Temuan yang beragam ini mengisyaratkan adanya pengaruh antara pengungkapan ESG, kinerja keuangan, serta nilai perusahaan belum konsisten, sehingga masih diperlukan penelitian lanjutan untuk menganalisis pengaruh antara pengungkapan ESG dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan pada BUMN di Indonesia, terutama pada periode 2022-2024, di mana BUMN mulai mengadopsi GRI *Standards* 2021 untuk laporan keberlanjutan.

Mengacu pada temuan studi terdahulu yang mencerminkan inkonsistensi pengaruh antara pengungkapan ESG, kinerja keuangan, dan nilai perusahaan, ditemukan celah penelitian yang menarik untuk dianalisis lebih mendalam. Beberapa penelitian sebelumnya berfokus pada sektor swasta atau perusahaan manufaktur, sementara penelitian terkait BUMN yang memiliki karakteristik tata kelola yang berbeda masih terbatas. Selain itu, periode penelitian yang bertepatan dengan masa awal penerapan kebijakan pelaporan ESG secara lebih komprehensif dan pengadopsian GRI *Standards* 2021 memberikan peluang untuk menganalisis dampak nyata dari kebijakan tersebut terhadap nilai perusahaan. Novelty studi ini menekankan kajian mengenai BUMN yang terdaftar di BEI periode 2022-2024.

Studi yang dilaksanakan akan memanfaatkan data terkini untuk memberikan gambaran yang lebih relevan dengan kondisi pasar dan regulasi saat ini. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah pengungkapan ESG dan kinerja keuangan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada BUMN yang terdaftar di BEI periode 2022-2024.

1.2. Perumusan Masalah

Merujuk pada gambaran dari latar belakang sebagaimana telah diuraikan, berikut permasalahan yang dapat dirumuskan:

1. Apakah pengungkapan ESG berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2022-2024?
2. Apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2022-2024

1.3. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah sebagaimana telah diuraikan, berikut tujuan penelitian:

1. Untuk menelaah pengaruh pengungkapan ESG terhadap nilai perusahaan pada BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2022-2024.

2. Untuk menelaah pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan pada BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2022-2024.

1.4. Manfaat Penelitian

Merujuk pada penelitian ini, peneliti mengkasifikasikan manfaat penelitian menjadi dua bagian, yaitu:

1.4.1 Manfaat Operasional (Praktis)

1. Bagi Manajemen BUMN, penelitian ini berpotensi menjadi dasar saat penyusunan strategi pengelolaan berkelanjutan serta peningkatan kinerja keuangan guna memperkuat nilai perusahaan di pasar modal. Dengan memahami pengaruh pengungkapan ESG, BUMN dapat memperbaiki transparansi dan tata kelola yang berdampak pada kepercayaan *stakeholder*.
2. Bagi Investor, penelitian ini berpotensi menjadi sumber informasi tambahan pada proses menentukan investasi, yang tidak sekedar berfokus pada kinerja keuangan melainkan juga mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola sebagai acuan yang mencerminkan risiko serta potensi di masa mendatang.

1.4.2 Manfaat dalam Pengembangan Ilmu (Akademis)

1. Bagi Perguruan Tinggi, penelitian ini berpotensi mampu untuk berkontribusi dalam referensi ilmiah yang berhubungan dengan keterkaitan antara pengungkapan ESG, kinerja keuangan, dan nilai perusahaan, khususnya pada BUMN di Indonesia. Serta memberikan ilmu pengetahuan

secara khusus pada bidang mata kuliah akuntansi. Selain itu, terhadap harapan di waktu mendatang untuk penelitian lebih lanjut yang akan menggunakan dan mempelajari topik ini.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini berpotensi menyumbang kontribusi dan referensi bahan masukan bersama dengan perbandingan atas topik yang sama di masa mendatang, sehingga penelitian ini lebih sempurna dan lengkap.